

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
2017-2019

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. QUICK WINS

BAB II MANAJEMEN PERUBAHAN

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB III PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB IV PENATAAN TATA LAKSANA

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB V PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB VI PENGUATAN PENGAWASAN

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB VII PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB IX PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) seringkali dipandang oleh sementara pihak hanya sebagai proses birokrasi rutin yang akan berakhir tanpa makna. Terlepas dari apa-pun pandangan, RB bukanlah konsep rutin karena RB lahir akibat krisis multidimensi Tahun 1998 yang mengakibatkan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut akhirnya memunculkan tekad bangsa Indonesia untuk “berubah” meninggalkan masa kelam menuju bangsa yang berdaya saing. Tekad tersebut kemudian secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dengan menetapkan visi cukup menantang, yaitu **“Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur”**.

Berangkat dari tantangan visi tersebut, Tahun 2004 pemerintah menyadari bahwa visi pembangunan nasional tersebut akan sulit (bahkan tidak mungkin) dicapai apabila budaya birokrasi pemerintahan tetap seperti yang ada selama ini. Pemerintah bertekad bahwa reformasi gelombang pertama di bidang politik dan ekonomi harus diikuti dengan reformasi di bidang birokrasi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang telah terbukti berlaku secara universal. Tekad itu kemudian dituangkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi dengan menetapkan Visi **“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”** berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Visi tersebut mengandung makna bahwa jajaran birokrasi harus memiliki landasan berfikir, cara pandang, bersikap, dan bertingkah laku menjadi birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada Tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, perubahan adalah suatu keniscayaan, yaitu perubahan terencana dengan target yang terukur berlandaskan komitmen kuat untuk melaksanakannya.

Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesaPDTT) telah menyusun Road Map

Reformasi Birokrasi (RB) pada bulan Oktober Tahun 2015 bersamaan dengan tahun terbentuknya Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Road Map* RB tersebut merupakan operasionalisasi dari *Grand Design* RB 2010-2015 yang disusun setiap lima tahun sebagai rencana rinci RB KemendesaPDTT. Namun disadari bahwa sebagai kementerian baru hasil integrasi secara parsial 3 (tiga) urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi tugas dari tiga lembaga yang berbeda, masa 2 (dua) tahun pertama melaksanakan RB merupakan periode pembelajaran melalui proses konsolidasi sekaligus menemu-kenali berbagai persoalan dalam mengimplementasikan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Proses pembelajaran dan konsolidasi tersebut juga digunakan untuk mempelajari dan memahami bagaimana seharusnya proses dilaksanakan dan letak titik-titik rawan yang memerlukan perubahan sebagai landasan pijak dalam merancang proses reformasi yang lebih implementatif. Melalui proses pembelajaran dan konsolidasi itu diperoleh kesadaran bahwa didalam *Road Map* RB yang ada masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mampu mengakomodasikan dinamika perubahan yang sangat cepat akibat terjadinya pergeseran nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menyikapi dinamika perubahan yang terjadi, KemendesaPDTT berpandangan bahwa perlu adanya review atas *Road Map* RB untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan serta rasionalisasi jadwal pelaksanaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai sasaran kinerja Kementerian. Kerangka logis *review Road Map* RB KemendesaPDTT ini didasarkan atas hasil identifikasi dan evaluasi yang dilakukan secara oleh Tim *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal KemendesaPDTT, hasil *mid-term review* RPJMN 2015-2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), perkembangan capaian kinerja Kementerian sampai dengan akhir Tahun 2016, serta hasil evaluasi penguatan akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis *review Road Map* RB KemendesaPDTT disajikan dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1
Kerangka Logis *Review Road Map* Reformasi Birokrasi
Kemendes PDTT



Sedangkan arah *review Road Map* RB lebih di titik beratkan pada pengarusutamaan RB dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian yang disajikan seperti pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2
Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi Dalam Perencanaan serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan

